



**PUTUSAN**

Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Sor



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

██████████, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Maruyung RT 001/RW 003 Desa Cipinang, Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Sor pada tanggal 01 November 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Tia Sintia** umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan -, tempat kediaman di Kampung Maruyung RT 001/RW 003 Desa Cipinang Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung dengan **Riki Ardiansyah**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di kampung Cimaung Sabeulah RT 001 RW 010 Desa Cimaung, Kecamatan Cimaung, Kabupaten

Halaman 1 dari halaman 5 Putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnyanya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan

4. Bahwa calon suami (anak Pemohon) berstatus Jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta ribu rupiah). Begitupun calon isteri, anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga

5. Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari halaman 5. Putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Sor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak kami bernama ( **Tia Sintia binti Yuyun** ) untuk menikah dengan calon Suami bernama ( **Riki Ardiansyah bin Dani**);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 121 HIR jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Majelis menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di

Halaman 3 dari halaman 5. Putusan Nomor **437/Pdt.P/2019/PA.Sor.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak pula ternyata ketidakhadirannya tersebut didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinilai tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya, maka Majelis sepakat untuk menggugurkan permohonan Pemohon sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon gugur
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp.266.000,00 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);**
- 3.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarok, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kamil Amrulloh, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari halaman 5. Putusan Nomor **437/Pdt.P/2019/PA.Sor.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Kamil Amrulloh, S.H.I.**

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I..**

Hakim Anggota II

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Nina Kristinawati, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran        | : Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses             | : Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon  | : Rp. 170.000,-        |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. ,-               |
| 5. PNB                      | : Rp. 20.000,-         |
| 6. Meterai                  | : Rp. 6.000,-          |
| 7. Redaksi                  | : Rp. 10.000,-         |
| <b>Jumlah</b>               | <b>: Rp. 286.000,-</b> |

Halaman 5 dari halaman 5. Putusan Nomor 437/Pdt.P/2019/PA.Sor.